



## **PENGUMUMAN**

Nomor : 8/PN.01.02

Tentang

### **Pengadaan Jasa Tenaga Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/-077.92 Tanggal 12 Desember 2023, perihal Permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini diberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi dengan formasi:

- a. **Assistant Supervisor Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 (satu) orang.**
  - b. **Analisis Aspirasi Masyarakat sebanyak 1 (satu) orang**
- I. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS MELIPUTI:
- a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - b. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
  - c. Formulir Isian Kualifikasi;
  - d. Foto Copy Identitas Kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
  - e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
    1. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

2. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
  3. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
  4. Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
  5. Bersedia ditempatkan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  6. Tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan anggaran dalam DPA-Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 atau proses pengadaan langsung dibatalkan;
  7. Tidak Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
  8. Menjaga seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pemprov DKI dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
- g. Foto Copy Ijazah yang sesuai dengan syarat kualifikasi;
- h. Foto berwarna ukuran 4x6;
- i. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV);

## II. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS MELIPUTI:

### a. Assistant Supervisor Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tanaga Ahli Tidak Ber SKA / SKK Pengalaman Minimal 3 (tiga) Tahun, dengan persyaratan:

1. Memiliki latar belakang pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota / S1 Statistik / S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan / S1 Administrasi Publik / S1 Administrasi Negara yang memadai dengan pengalaman kerja;
2. Diutamakan memiliki pengalaman dalam melakukan forecasting makroekonomi dan/atau infografis;
3. Diutamakan memiliki pengalaman dalam penyusunan kebijakan publik;
4. Dapat mengoperasikan Microsoft Office dengan baik dan penguasaan program lainnya guna mendukung pekerjaan menjadi nilai tambah;
5. Berperilaku baik, open mind dan positif thinking;
6. Mampu berkomunikasi dengan baik;

7. Mampu bekerja bersama (team work);
8. Memiliki manajemen waktu yang baik;
9. Disiplin, cekatan, dan berorientasi pada hasil; dan
10. Berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

b. Analisis Aspirasi Masyarakat

Tanaga Ahli Senior Assistant Professional Staff, dengan persyaratan:

1. Memiliki latar belakang pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota / S1 Statistik / S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan / S1 Administrasi Publik / S1 Administrasi Negara;
2. Diutamakan memiliki pengalaman dalam melakukan forecasting makroekonomi dan/atau infografis;
3. Dapat mengoperasikan Microsoft Office dengan baik dan penguasaan program lainnya guna mendukung pekerjaan menjadi nilai tambah;
4. Berperilaku baik, open mind dan positif thinking;
5. Mampu berkomunikasi dengan baik;
6. Mampu bekerja bersama (team work);
7. Memiliki manajemen waktu yang baik;
8. Disiplin, cekatan, dan berorientasi pada hasil; dan
9. Berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirimkan data lamaran sesuai dengan Persyaratan Administrasi/Kualifikasi pada tanggal 12-14 Desember 2023 melalui attachment ke email [rekrutmen.p2tbappeda@gmail.com](mailto:rekrutmen.p2tbappeda@gmail.com) Up. Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

### IV. JADWAL SELEKSI

Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan di Jakarta, penjadwalan untuk seluruh tahapan seleksi adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan	Jadwal
1.	Pengumuman Pengadaan	12 Desember 2023
2.	Pendaftaran	12-14 Desember 2023
3.	Seleksi Administrasi	14 Desember 2023
4.	Pengumuman Seleksi Administrasi	15 Desember 2023
5.	Seleksi Tertulis dan Interview	18 Desember 2023
6.	Pengumuman Seleksi Tertulis dan Teknis	19 Desember 2023

## V. LAIN-LAIN

- a. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi, maka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
- b. Bagi Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan Gugur;
- c. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan Pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
- d. Keputusan Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 12 Desember 2023  
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



Ahnafian Hafidh  
NIP 199611022019031007

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
No. Identitas :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Belanja Jasa **Tenaga Ahli Assistant Supervisor Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta/Analisis Aspirasi Masyarakat** pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPAJAPIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, . . . . . 2023

Nama

## FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
No. Identitas :  
Alamat :  
Telepon/Fax :  
Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak;
2. Saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan pihak lain yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengaduan, tidak pailit atau kegiatan usahanya sedang dihentikan;
6. Data-Data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

- 1 Nama :
- 2 Pekerjaan :
- 3 Alamat Rumah :
  
- No. Telepon :
- 4 Alamat Kantor :
  
- No. Telepon :
- 5 Email :
- 6 Nomor Identitas :

B. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan  
(contoh)

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat; Telepon		Nomor; Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana)	Prestasi Kerja (%)
1	Tenaga Ahli Data Entry Pengelolaan Kearsipan	Mengelola Arsip Dinamis Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital secara efisien, efektif, dan sistematis. Adapun ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis Bappeda yang akan dikerjakan meliputi pemeliharaan, serta penyusutan arsip.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Jalan Medan Merdeka Selatan No 8-9, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110; 021-3822261	Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta	12/- 077.922; 04 Januari 2021	Rp. 69.720.000 ,-	12/- 077.922	80%

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, . . . . . 2023

Materai

Nama



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4. Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
5. Bersedia ditempatkan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
6. Tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan anggaran dalam DPA-Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 atau proses pengadaan langsung dibatalkan;
7. Tidak Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
8. Menjaga seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pemprov DKI dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, . . . . . 2023

Materai

Nama